

PANDUAN

Pengembangan Rencana Kerja Advokasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

The image shows the cover and two sample pages of a manual for the BKKBN SMART program. The cover is blue with a yellow corner graphic and the BKKBN logo. The first sample page is titled 'Menetapkan Isu Strategis' and includes a section for 'Isu Strategis' with three bullet points (A, B, C) and a 'Penjelasan dan Contoh' section. The second sample page is titled 'Pertanyaan NetMap' and features a network diagram with six actors (Aktor 1 to Aktor 6) connected by lines. The diagram includes a legend for 'Hubungan' (Koordinasi and Mempengaruhi) and a box for 'Unsur' (Eksekutif, Legislatif, Mitra Kerja). The page also includes fields for 'Tanggal', 'Fasilitator', and 'Narasumber'.

Lembar Kerja
Pengembangan Strategi Advokasi
Pengelola Program KKBPK
BKKBN SMART

Menetapkan Isu Strategis

Isu Strategis

A.

B.

C.

Penjelasan dan Contoh
Pada bagian ini, Kelompok Kerja yang dihadapi, misalnya strategisnya misal A.

Pertanyaan NetMap
Siapa yang paling berpengaruh dalam ..
(Tujuan Advokasi – AFP SMART - Langkah 1)

Tanggal

Hubungan:
— Koordinasi
— Mempengaruhi

Aliansi
Aktor 2

Fasilitator:
- Fasilitator 1
- Fasilitator 2

Narasumber:
- Narsum 1
- Narsum 2

Unsur
Eksekutif
Legislatif
Mitra Kerja

Aktor 1 +1
Aktor 2 3+
Aktor 3 3+
Aktor 4 +1
Aktor 5 4+
Aktor 6 +4

Dokumen ini adalah bagian dari seri panduan pendamping Strategi Komunikasi dan Advokasi Program KKBPK BKKBN, Diterbitkan oleh ***Direktorat Advokasi dan KIE*** sebagai rujukan bagi pengembangan rencana kerja advokasi KKBPK di tingkat nasional dan subnasional.

Panduan Pengembangan Rencana Kerja

**Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga**



**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2017**

Penyusun : Heri Haerudin
Kontributor : Tim Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN

KATA PENGANTAR

Direktur

Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi

Buku ini terbit sebagai lanjutan dan merupakan panduan bagi TIM Advokasi KKBPK dalam mengembangkan Rencana Kerja. Setelah sebelumnya dikembangkan Dokumen Strategi Komunikasi dan Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang merupakan upaya penerjemahan arah kebijakan Advokasi Program KKBPK tersebut ke dalam bentuk strategi yang akan menjadi panduan makro dalam mengembangkan program yang kuat di semua tingkat, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, buku ini terbit sebagai lanjutan dan merupakan panduan bagi TIM Advokasi KKBPK dalam mengembangkan Rencana Kerja.

Perlu selalu digarisbawahi bahwa isu KKBPK merupakan isu yang lintas dimensi, multi aspek dan lintas sektor. Artinya bahwa mulai dari penyusunan kebijakan hingga implementasi pada aksi nyata di level terendah, proses advokasi merupakan awal dalam meningkatkan partisipasi para pemangku kebijakan. Semua sektor yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan KKBPK harus bersama-sama menunjukkan keberhasilannya.

Tim Advokasi KKBPK juga harus bekerja secara sistematis dan terorganisir. Tim ini juga harus peka dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis dalam konteks advokasi program. Dinamika lingkungan strategis di berbagai tingkatan selalu membawa peluang dan tantangan. Hal inilah yang perlu diantisipasi melalui rencana kerja yang disusun dengan baik.

Saya menyambut baik dikembangkannya Panduan Pembentukan dan Pengembangan Rencana Kerja Tim Advokasi KKBPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan upaya penting dalam mengimplementasikan strategi advokasi KKBPK yang telah tertuang dalam dokumen sebelumnya. Tentu, berdasarkan Rencana kerja ini nantinya Tim Advokasi KKBPK di Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melaksanakan bentuk dan aksi nyata advokasi yang terstruktur, sistematis dan terorganisir sehingga dampak dan outcome yang diharapkan akan dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien

Jakarta, Oktober 2017
Direktur Advokasi dan KIE



Sugiyono S. Pd, MM

Ucapan Terima Kasih

Dokumen panduan yang merupakan bagian dari paket strategi komunikasi dan advokasi ini merupakan hasil dari upaya bersama dari berbagai pihak melalui proses yang melibatkan diskusi, saling tukar pikiran, saling berbagi data dan sumber daya.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Heri Haerudin, konsultan BKKBN yang telah menyusun dokumen ini berdasarkan bahan-bahan dari Program Advance Family Planning (AFP) yang di Indonesia diimplementasikan oleh John Hopkins Center for Communication Program (JHCCP) dan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP).

Tidak kami lupakan peran para Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi serta Kelompok Kerja Advokasi KKBPK baik di provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah memberikan input dan masukan berdasarkan pengalaman nyata di lapangan.

Direktorat Advokasi dan KIE

Daftar Isi

Kata Pengantar Direktur Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	i
Ucapan Terima Kasih	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Mengapa Kita Perlu Melakukan Advokasi	2
B. Pengertian dan Tujuan Advokasi	4
BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI KKBPK LINTAS SEKTORAL	7
A. Tujuan Advokasi KKBPK Lintas Sektoral	8
B. Beberapa Pengalaman Penerapan Advokasi KKBPK Lintas Sektor	9
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN ADVOKASI	13
1. Mengembangkan Kelompok Kerja Advokasi	15
2. Memetakan jejaring setempat dan tingkat keterlibatan masing-masing institusi	16
3. Memetakan sumber daya yang tersedia di daerah (anggaran, manusia, kecakapan, aset, dll)	17
4. Mengemas isu KKBPK sebagai isu yang berdimensi lintas sektor	17
5. Menuangkan argumentasi dalam lembar kebijakan (policy brief)	19
6. Mengembangkan rencana kerja yang SMART dan koordinasi untuk mengawalinya	19
7. Memantau dan Mengevaluasi	19
8. Meresmikan Kelompok Kerja Kedalam Operasional Pemerintah	19
BAB IV INSTRUMEN PENGEMBANGAN ADVOKASI BERBASIS DATA: BKKBN SMART	21
A. Kecakapan yang Diperlukan dalam Program Advokasi	22
B. Skema Pengembangan Kapasitas Pengelola Program Advokasi dan KIE	23
C. Instrumen Pengembangan Advokasi Berbasis Data	24
Pemetaan Jejaring Advokasi	26
Panduan Advokasi BKKBN SMART	29

BAB I

Pendahuluan

A. MENGAPA KITA PERLU MELAKUKAN ADVOKASI?

Untuk mencapai RPJMN BKKBN, program KKBPK dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, harus memastikan hal-hal berikut:

- Tidak adanya hambatan dari sisi kebijakan dan peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan program KKBPK secara efektif dan maksimal.
- Tersedianya kebijakan dan peraturan yang mendukung program KKBPK.
- Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, baik dari segi anggaran, kecakapan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program.
- Terselenggaranya kerja sama dan koordinasi dengan baik dari segi kebijakan maupun program/aktivitas di tingkat lapangan.

Hal di atas menjadi tantangan besar karena terdapat perubahan tata kelola pemerintahan yang berimplikasi pada perlunya strategi baru untuk meresponnya, yakni kebijakan desentralisasi.

Desentralisasi di Indonesia dimulai di dasawarsa 2000an, dan BKKBN mulai terdesentralisasi pada tahun 2004. Dengan skema ini, SKPD KB di tingkat kabupaten/kota dibiayai dan diatur oleh pemerintah setempat. Kondisi ini membawa pada situasi yang tidak kondusif untuk mengembangkan program KB yang efektif. Dari sisi pengembangan program, BKKBN nasional tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi keputusan di tingkat kabupaten. Prioritas yang rendah dari kabupaten juga tercermin dari masih sedikitnya kelembagaan BKKBN yang berdiri sendiri di kabupaten, hampir seluruhnya merupakan gabungan dengan kantor lain, seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini membuat struktur perencanaan program terputus, termasuk dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Berdasarkan temuan lapangan, diskusi dan pengalaman implementasi program advokasi seperti yang dipaparkan sebelumnya, dapat dirangkumkan bahwa problem yang dihadapi adalah:

- Tidak banyak pimpinan daerah yang memberi prioritas pada program KKBPK sehingga alokasi anggaran program KKBPK juga di banyak daerah tidak mencukupi kebutuhan program dan besar masalah KKBPK di daerah itu serta bentuk lembaga KKBPK di daerah yang masih banyak digabungkan dengan sektor lain.
- Oleh pemangku kepentingan daerah Program KKBPK belum dilihat sebagai program yang berdimensi dan memiliki kemanfaatan lintas sektor, ia hanya dilihat sebagai program alokasi saja.
- Dari sisi SDM, rekrutmen pimpinan SPKPD KB juga kerap tidak mempertimbangkan kapasitas di bidang KKBPK, sehingga para pengelola kurang cakap dalam merancang dan mengelola program. Kadang staff yang sudah terlatih, mengalami mutasi ke kantor lain.
- Terdapat potensi dana di daerah yang berpotensi menutup kekurangan anggaran APBD untuk program KKBPK namun belum dimanfaatkan misalnya dana-dana di desa (APBDes, Dana Desa, Anggaran Dana Desa, dll).
- Masih perlu dimaksimalkannya pemanfaatan potensi besar sumber daya yang ada di daerah selain potensi anggaran, misalnya potensi sumber daya pergerakan (contoh: jejaring berbagai

organisasi yang dapat merespon situasi kurangnya penggerakan KB akibat tidak idealnya jumlah PLKB yang tersedia), sumber daya kecakapan (contoh: kepakaran pengembangan program komunikasi di perguruan tinggi), sumber daya media (contoh: media yang dikelola jejaring Kominfo), dll.

Permasalahan dari sisi pengelolaan program ini kemudian berdampak pada situasi dan capaian program KKBPK baik secara subnasional maupun nasional. Ini pada gilirannya, akan memberi dampak pada sektor pembangunan lain. Diagram yang dikembangkan oleh Bappenas di bawah ini, menunjukkan keterkaitan antara program KKBPK dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kaitan antara Target KB dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Deputi Kementerian PPN/Bappenas, Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Hal-hal di atas hanya bisa terjadi, jika dilakukan upaya yang sistematis dan terukur untuk mendapatkannya.

Upaya itu berupa program advokasi KKBPK yang lintas sektoral. Hal ini mengingat peran strategis KKBPK di mana keberhasilannya akan memberi fundamen kuat bagi pencapaian tujuan program di sektor lain, sebaliknya tujuan pembangunan di sektor lain ini akan sangat sulit dicapai jika program KKBPK tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Masalahnya, saat ini program atau intervensi advokasi di tingkat nasional dan subnasional (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), masih perlu ditingkatkan secara signifikan karena masih menghadapi kendala-kendala.

Salah satu problem utama dari aspek advokasi adalah masih banyaknya salah pengertian mengenai pengertian advokasi. Masih banyak pengelola program dan mitra yang menyamakan pengertian advokasi dengan KIE. Padahal secara garis besar, ke dua hal ini berbeda secara konseptual sehingga berbeda pula dalam pengembangan strategi maupun perancangan program/kegiatannya.

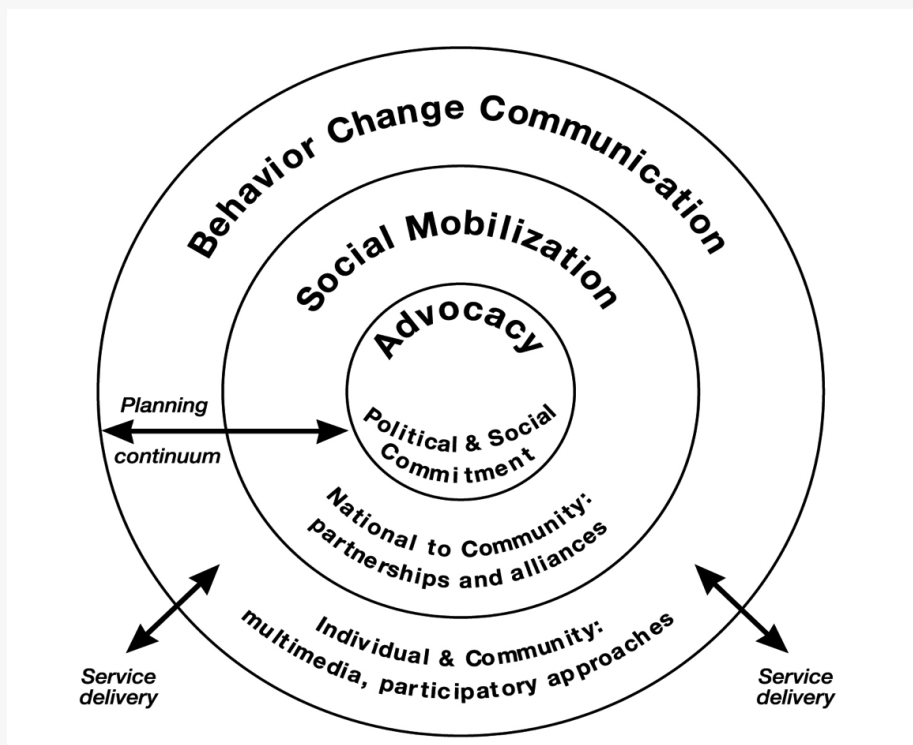
Secara umum kegiatan advokasi di tingkat lapangan yang kurang berhasil, umumnya disebabkan karena:

- Menyamakan Advokasi dengan KIE
- Advokasi diimplementasikan hanya dengan rapat/pertemuan/audiensi saja. Setelah pertemuan. Advokat tidak memberikan bahan yang dibagikan (pertinggal, lembar kebijakan atau policy brief) untuk dibaca kembali oleh sasaran khalayak advokasi.
- Lebih banyak mengungkap fakta ketimbang mendefinisikan permintaan (*Fact sheet* disamakan dengan *Policy brief*).
- Permintaan tidak didukung data atau konsekuensi tidak dituangkan secara kongkrit
- Sasaran advokasi salah, karena tidak memetakan sasaran advokasi dengan akurat. Sehingga sasaran tersebut tidak bisa mengambil keputusan yang diharapkan.
- Menuntut saja, tidak memikirkan situasi/kondisi/kepentingan/hambatan, dll dari sisi sasaran advokasi.

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN ADVOKASI

Secara garis besar sebuah kampanye komunikasi suatu program pembangunan memiliki tiga komponen yang saling berkait, saling mempengaruhi dan saling mendukung, yaitu:

- Komunikasi Perubahan Perilaku.
- Mobilisasi Sosial.
- Advokasi



Sumber McKee et al., 2000, McKee, 1992

Perbedaan mendasar dari ketiganya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Perbedaan Advokasi, Komunikasi Perubahan Perilaku dan Mobilisasi Sosial

Komponen	Tujuan
Advokasi	Mendapatkan: • Komitmen politik dan perubahan kebijakan. • Alokasi sumber daya dan layanan. • Percepatan implementasi program. • Regulasi/kebijakan/aturan. • Fasilitas. • Pendanaan. • Sumber daya manusia.
Mobilisasi Sosial	Upaya menggerakkan semua pihak yang dapat mendukung program untuk melakukan satu atau lebih kegiatan/program (lembaga pemerintah, masyarakat madani (LSM, Asosiasi, perkumpulan, dll)).
Komunikasi Perubahan Perilaku	Merubah/mengembangkan: • Cara berfikir. • Sikap. • Perilaku.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa program komunikasi perubahan perilaku atau kerap disebut KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta program mobilisasi sosial yang selama ini dijalankan oleh pelaku program KKBPK, sangat membutuhkan dukungan advokasi yang kuat.

BAB II

Tujuan Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi KKBPK Lintas Sektoral

A. TUJUAN ADVOKASI KKBPK LINTAS SEKTORAL

Berdasarkan pemikiran dan kondisi di atas, dirasakan perlu dikembangkannya suatu metoda perancangan program advokasi dan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dapat digunakan di tingkat nasional dan subnasional. Metoda ini harus bersifat sederhana sehingga bisa dilaksanakan oleh SDM yang berjumlah terbatas dengan kecakapan yang beragam dan bersifat generik sehingga bisa diterapkan di berbagai daerah dengan situasi dan kondisi yang beragam.

Seperti disebutkan di atas, program KKBPK bersifat strategis dan memiliki dampak lintas sektor. Oleh karena itu perlu dikembangkan kelompok kerja atau gugus tugas advokasi yang bersifat lintas sektoral di berbagai tingkat:

1. Forum Advokasi KKBPK di tingkat nasional.
2. Kelompok Kerja Advokasi KKBPK di tingkat Provinsi.
3. Kelompok Kerja Advokasi KKBPK di tingkat Kabupaten/Kota.

Program advokasi yang dirancang, diimplementasi, dipantau serta dievaluasi ini diharapkan dapat memberikan dampak tidak saja pada dukungan pada program tetapi juga pada gilirannya memberikan dampak pada perbaikan capaian program KKBPK.

Sasaran

1. Terbentuknya forum advokasi di tingkat nasional.
2. Terbentuknya kelompok kerja advokasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dikembangkannya rencana advokasi tahunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merespon pada situasi KKBPK, yang diimplementasikan sebagai kegiatan yang berjalan sepanjang tahun serta dimonitor dan dievaluasi untuk pengembangan siklus tahun berikutnya.

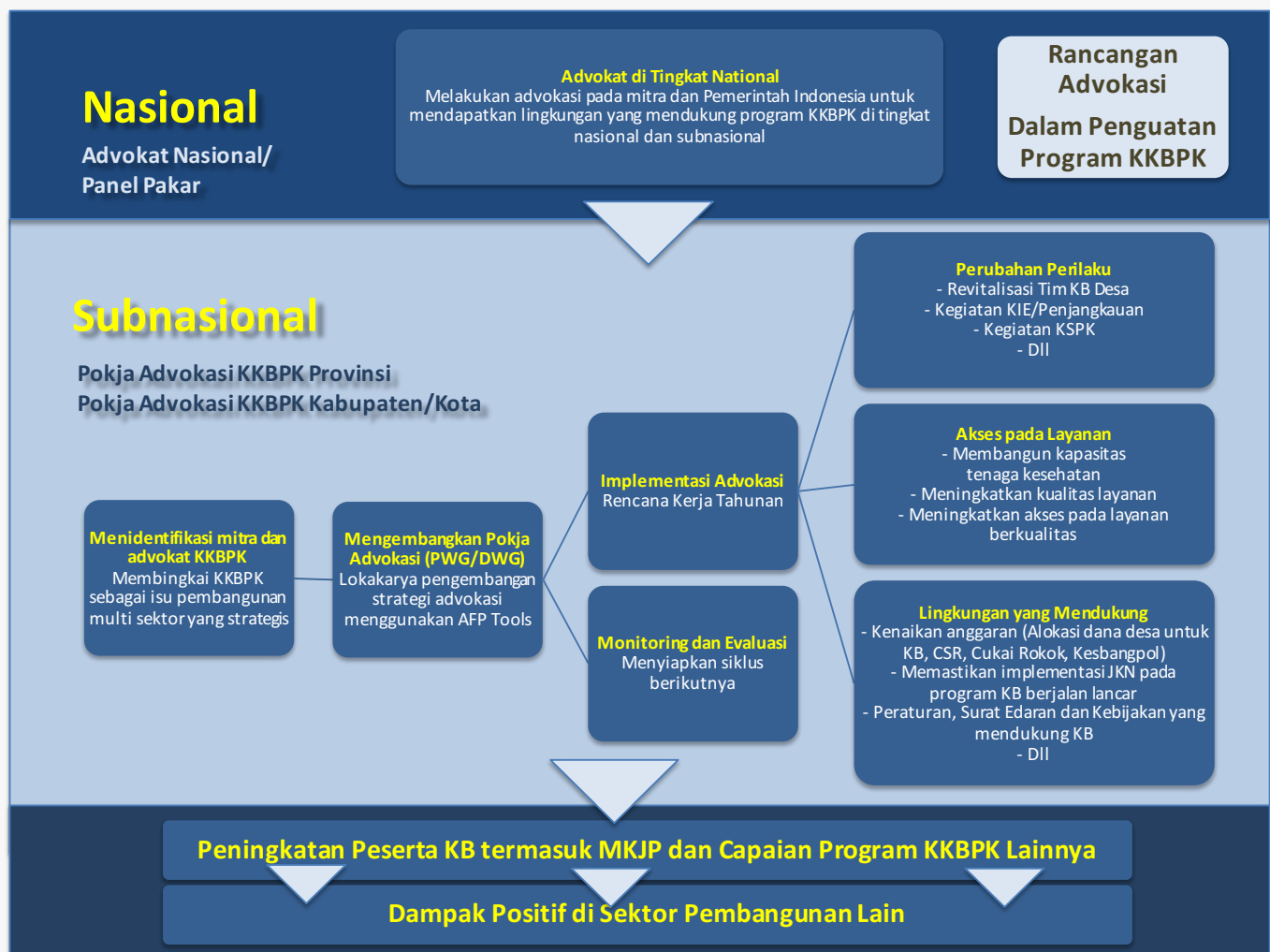
Hasil yang diharapkan dan Indikator keberhasilan

Jika kelompok kerja advokasi ini berjalan dengan baik maka kondisi yang diperlukan untuk terbangunnya suatu kinerja program yang KKBPK efektif yang dapat diandalkan untuk mencapai target-target dalam RPJMN, yakni:

- Tidak adanya hambatan dari sisi kebijakan dan peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan program KKBPK secara efektif dan maksimal
- Tersedianya kebijakan dan peraturan yang mendukung program KKBPK
- Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, baik dari segi anggaran, kecakapan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program
- Terselenggaranya kerja sama dan koordinasi dengan baik dari segi kebijakan maupun program/aktivitas di tingkat lapangan

Hal-hal yang dipaparkan di atas jika digambarkan ke dalam bagan, akan nampak seperti berikut:

Kerangka Logis Pendekatan Advokasi KKBPK



Kerangka logis ini didasarkan pada pengalaman program advokasi di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang mengadopsi pendekatan advokasi Advance Family Planning (AFP).

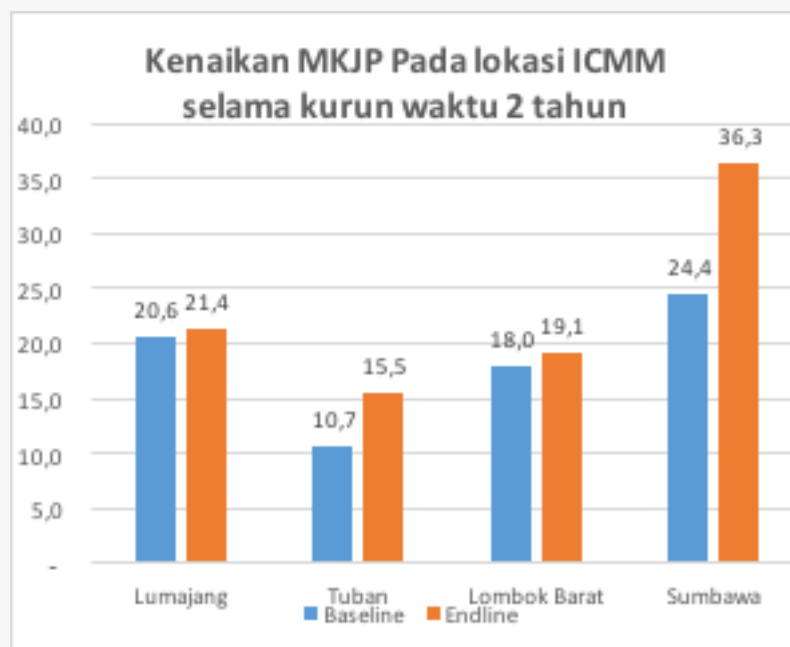
B. BEBERAPA PENGALAMAN PENERAPAN ADVOKASI KKBPK LINTAS SEKTOR

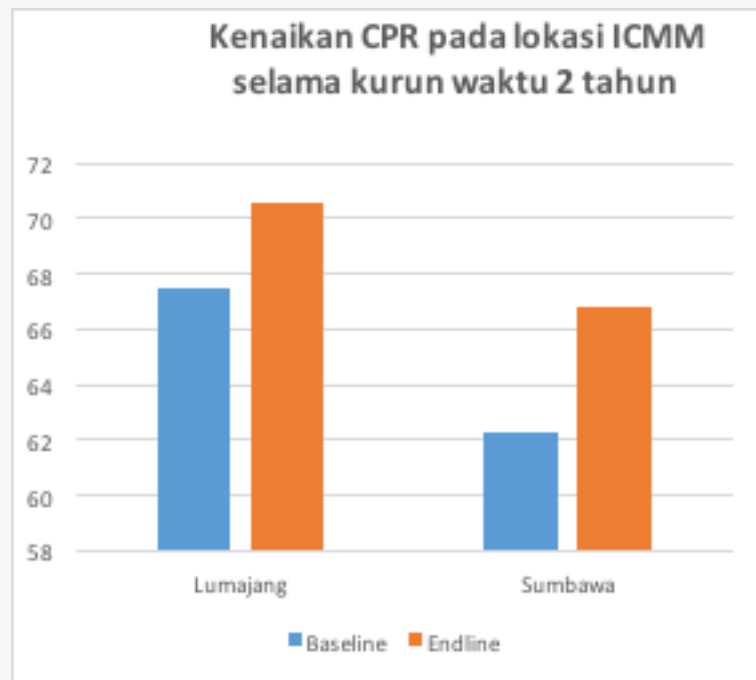
Tabel berikut menunjukkan contoh capaian-capaian advokasi yang berhasil diraih oleh kelompok kerja advokasi yang saat ini sudah ada di beberapa provinsi dan kabupate/kota dalam program Advance Family Planning (AFP), Improving Contraceptive Method Mix (ICMM) dan Program PilihanKu. Tabel ini mengilustrasikan hal-hal yang bisa dicapai dalam jangka waktu 1 – 1,5 tahun sejak kelompok kerja advokasi provinsi dan kabupaten/kota dibentuk.

Beberapa Contoh Capaian dari Pokja Advokasi KKBPK yang Sudah Terbentuk	
Pembiayaan	Kebijakan
APBD APBD Lumajang dialokasikan untuk mendukung Tim KB Kecamatan dan Desa sebesar Rp 200,000,000 Pemda Gowa Adanya peningkatan anggaran dari APBD II untuk pengadaan alkon (KB-MKJP) dari 50 juta di tahun 2015 menjadi 85 juta di tahun 2016. Adanya peningkatan anggaran dari APBD II untuk pelayanan Tim KB keliling Tingkat Kabupaten ke Kecamatan dari 97 juta di tahun 2015 menjadi 144 juta di tahun 2016 Dana di Desa APBDes di Asahan digunakan untuk revitalisasi program KB di 117 desa, dengan total penganggaran Rp. 3.519.300.000, untuk tahun anggaran 2017 APBDes di Lombok Barat digunakan untuk KB di 110 desa, berkisar antara Rp. 7.500.000 – 15.000.000 pada tahun 2016. APBDes di Tuban dialokasikan untuk biaya operasional 308 tim KB Desa dengan kisaran Rp. 1.300.000 – 22.500.000/desa/tahun dengan total Rp.1.42 milyar, tahun 2016 Dana CSR Kabupaten Bulukumba mendapatkan pendanaan untuk program dan kegiatan Dinas Dalduk dan KB sebesar Rp. 500.000.000 dari bea cukai rokok Sumber Lain Pembiayaan pelatihan KB Pasca Persalinan dari Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Brebes sebesar Rp. 250.000.00 di tahun 2016	MOU Kementerian Desa dengan BKKBN SE Walikota Medan no 477/2016 tentang Pemberian Akte Kelahiran gratis kepada Anak Pesera KB Perbup no 257/tahun 2017 tentang Tata cara pembagian penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2017 Kesepakatan mengenai sertifikasi bidan Operasional Pokja oleh APBD Pokja Advokasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota disahkan oleh gubernur dan bupati sehingga memiliki dana operasional untuk advokasi Alokasi Anggaran APBD NTB untuk Pokja Advokasi sebesar Rp. 36.000.000 untuk tahun 2016 APBD Sumbawa membiayai pokja advokasi sebesar Rp. 48.000.000 pada tahun 2016. Pengembangan Kapasitas Pembiayaan untuk melatih CTU bagi 60 bidan di Lombok Timur pada tahun 2016

Beberapa Contoh Capaian dari Pokja Advokasi KKBPK yang Sudah Terbentuk	
Replikasi	Koordinasi dan Kerjasama
Surat Edaran Gubernur Jawa Timur untuk replikasi pokja advokasi di seluruh kabupaten/kota, kecamatan dan desa untuk mendukung Kampung KB.	Berkembangnya kerjasama antara SKPD KB, petugas lapangan KB, IBL, universitas, tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan Pokja advokasi (District Working Group/DWG) di Karanganyar, Lumajang, Tuban, Kediri, Lombok Timur, and Sumbawa. Sebanyak 20 tempat kerja di Pontianak setuju untuk memberikan rujukan MKJP. Ini menambah jumlah tempat kerja yang berkomitmen untuk mendukung KB menjadi 45 tempat di 2013/2014. Kerjasama dengan program PKH di Sulawesi Selatan Kerjasama dengan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) bersama Diskominfo di Provinsi Sumatera Utara

Dari sisi capaian statistik KB, hasil yang dicapai melalui advokasi ini kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan secara signifikan capaian program KB. Diagram berikut ini menunjukkan peningkatan capaian di wilayah kerja program ICMM setelah terjadi akselerasi program KKBPK dengan menggunakan sumber daya yang didapat dari kerja advokasi.





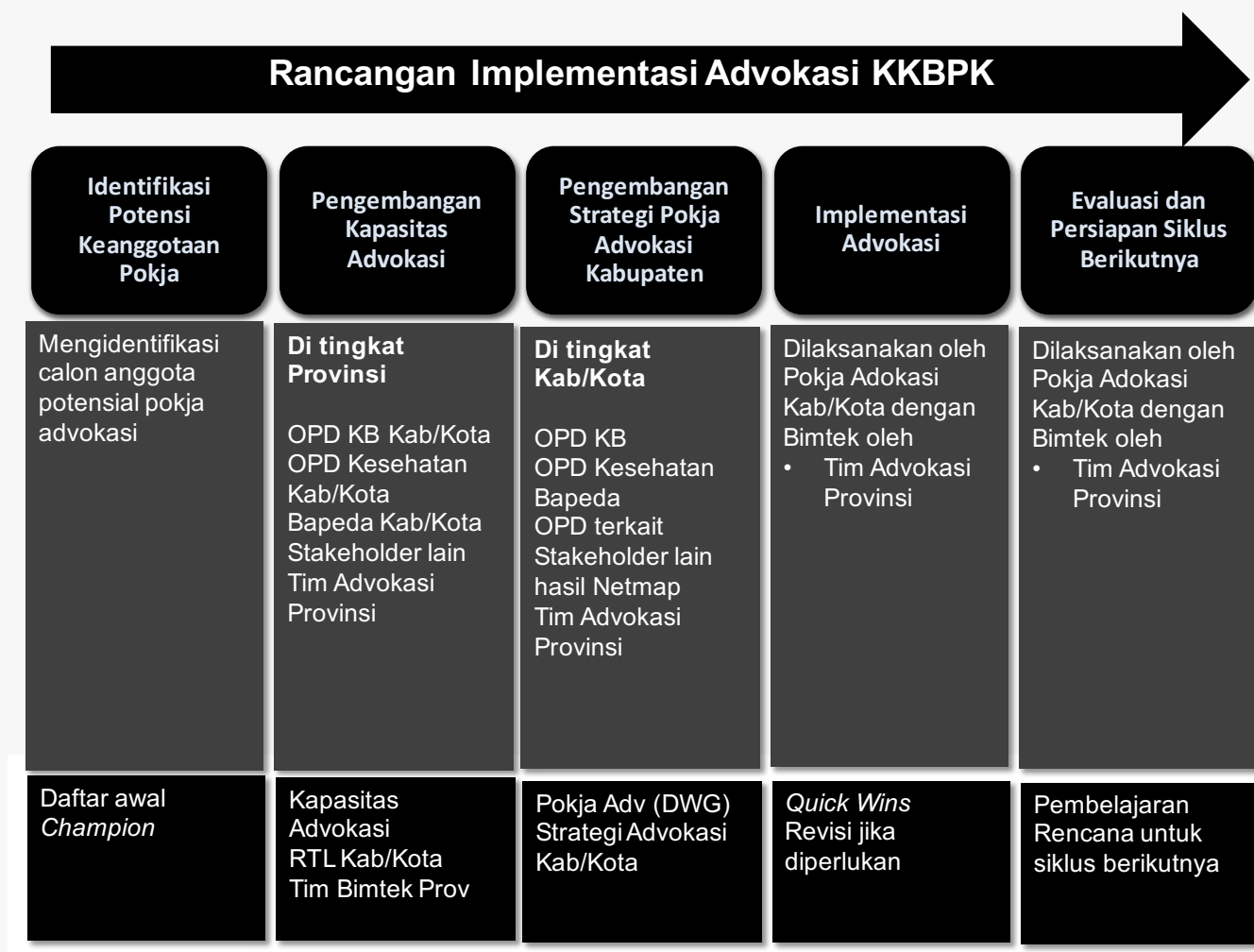
Sumber : Hasil survey data Baseline dan endline pada program ICMM oleh JHCCP – PPKUI, 2016

BAB III

Langkah-Langkah Pengembangan Advokasi

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN ADVOKASI

Sebagai upaya sistematis dan strategis, maka diperlukan langkah-langkah dalam melakukan advokasi. Terdapat beberapa alternatif langkah-langkah advokasi, berikut langkah-langkah advokasi yang dapat dilakukan oleh pengelola program KKBPK:



Jika didetailkan maka proses ini melibatkan 8 langkah utama, yakni:*

1. Mengembangkan kelompok kerja advokasi.
2. Memetakan jejaring setempat dan tingkat keterlibatan masing-masing institusi
3. Memetakan sumber daya yang tersedia di daerah (anggaran, manusia, kecakapan, asset, dll)
4. Mengemas isu KKBPK sebagai isu yang berdimensi lintas sektor
5. Menuangkan argumentasi dalam lembar kebijakan (*policy brief*)
6. Mengembangkan rencana kerja yang SMART dan koordinasi untuk mengawalinya
7. Memantau dan Mengevaluasi
8. Meresmikan kelompok kerja ke dalam operasional pemerintah

*langkah 2 – 6 dilakukan dalam proses pengembangan kapasitas advokasi (kolom dua dalam diagram di atas)

1. Mengembangkan Kelompok Kerja Advokasi

Sebuah kelompok kerja terdiri dari individu yang memiliki pengaruh, yang berasal dari berbagai institusi dan memiliki komitmen bagi pengembangan masyarakat, terutama bagi penyediaan informasi, layanan, dan/atau suplai keluarga berencana. Anggota kelompok kerja dipilih oleh pahlawan setempat dan menggunakan advokasi berbasis data/bukti (*evidence-based advocacy*) yaitu advokasi yang mengidentifikasi, mengkaji dan menggunakan temuan-temuan riset terbaru sebagai dasar dari kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai anggaran.

Contoh keanggotaan sebuah kelompok kerja tingkat kabupaten mencakup wakil dari:

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Dinas Kesehatan Kabupaten,
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI),
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD),
- Kantor Urusan Agama,
- Kantor Urusan Sosial Budaya,
- Kantor Urusan Pendidikan,
- Kantor Kependudukan,
- Dinas Sosial
- Dinas Komunikasi dan Informasi
- Organisasi profesi dokter atau perawat,
- Lembaga swadaya masyarakat seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI),
- Organisasi religius seperti Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU)
- Anggota DPRD,
- Tokoh masyarakat, dan
- Sektor swasta
- Dll, sesuai dengan kondisi di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota

BKKBN setempat dapat bertindak sebagai pimpinan koordinasi, walau di beberapa kabupaten/kota yang sudah memiliki kelompok kerja advokasi KKBPK, coordinator bisa dijalankan oleh pihak lain. Hal ini malah akan terlihat sangat positif karena semakin menunjukkan kenyataan bahwa isu KKBPK adalah isu strategis yang bersifat lintas sektoral.

Kelompok Kerja Advokasi

Kelompok kerja ini bersifat independen namun demikian ia dapat diresmikan sesuai pengalaman implementasi dalam program advokasi yang menggunakan pendekatan ini, banyak kelompok kerja advokasi yang kemudian diresmikan dan mendapatkan pengukuhan resmi melalui surat keputusan bupati/walikota. Hal ini karena pimpinan daerah mulai mengadopsi gagasan berfikir bahwa program KKBPK adalah program yang memiliki kemanfaatan lintas sektor dan dapat melindungi investasi pembangunan yang ada. Dengan diresmikannya kelompok kerja, maka kelompok kerja ini berhak mendapatkan dana operasional dari daerah. Inilah keunikan dari pendekatan ini, karena kelompok kerja mendapatkan dana dari pihak yang menjadi khalayak sasaran advokasi.

Namun demikian hal ini tidak merupakan keharusan, karena sebagai inisiatif pemangku kepentingan (BKKBN dan mitra), kelompok kerja ini dapat tetap berfungsi penuh.

Untuk kelompok kerja yang tidak diresmikan dengan SK Bupati/Walikota, biaya operasional bisa diambilkan dari biaya program advokasi SKPD KB atau secara bergiliran dibiayai oleh lembaga tepat anggota kelompok kerja bernaung (SKPD Kesehatan, pendidikan, Bappeda, dll). Hal ini dimungkinkan ketika para anggota sepakat bahwa kelompok kerja ini memiliki manfaat lintas sektor. Biaya yang perlu dikeluarkan juga tidak besar, sebagian terbesar biaya adalah untuk pertemuan, sehingga bisa dibiayai oleh dana rutin SKPD.

2. Memetakan jejaring setempat dan tingkat keterlibatan masing-masing institusi

Melalui pemetaan jaringan setempat, anggota kelompok kerja dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi, serta pihak-pihak yang berperan dominan dalam pengambilan keputusan.

Metode *Net-Map* dalam Memetakan Aktor dan Pengaruhnya (*power-play*)

Net-Map adalah suatu program pemetaan yang didasarkan pada diskusi kelompok untuk membantu orang memvisualisasikan, mendiskusikan, dan memahami situasi, aktor dan pola hubungan antara aktor serta siapa pihak yang paling berpengaruh.

Pemetaan ini memasukkan data kualitatif ke dalam analisis jejaring sosial, dan telah semakin banyak dipakai oleh praktisi di bidang komunikasi, advokasi, politik, gerakan sosial, dan pembelajaran organisasi. Dengan *Net-Map*, peserta belajar mengerti siapa yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan lalu mengembangkan suatu rencana aksi untuk membentuk jaringan.

Net-Map juga dapat memperjelas pemangku kepentingan yang tidak diketahui sebelumnya yang perlu diikutsertakan dalam kelompok kerja, sekaligus juga memperjelas kemungkinan sasaran advokasi.

3. Memetakan sumber daya yang tersedia di daerah (anggaran, manusia, kecakapan, aset, dll)

Mengingat program KKBPK membutuhkan seluruh dukungan yang mungkin didapatkan, kelompok kerja advokasi perlu membuat pemetaan terhadap sumber daya ini. Sumber daya inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai permintaan (*advocacy ask*) dalam kegiatan advokasi yang dirancang.

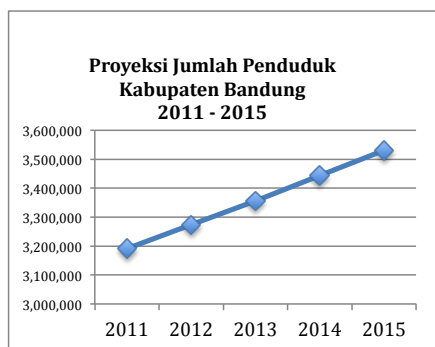
4. Mengemas isu KKBPK sebagai isu yang berdimensi lintas sektor

Pokja advokasi dapat mengembangkan suatu argumen untuk mengemas program KKBPK sebagai isu yang memiliki kemanfaatan lintas sektor, atau sebaliknya jika sektor KKBPK gagal maka sektor lain pun akan terkena dampak yang signifikan. Contoh logika argumen tersebut seperti nampak dalam ilustrasi berikut:

Langkah 1, Melakukan proyeksi jumlah penduduk dengan laju kependudukan saat ini

Ilustrasi Argumentasi

Investasi KB Berdampak Positif pada Bidang Pembangunan Lain

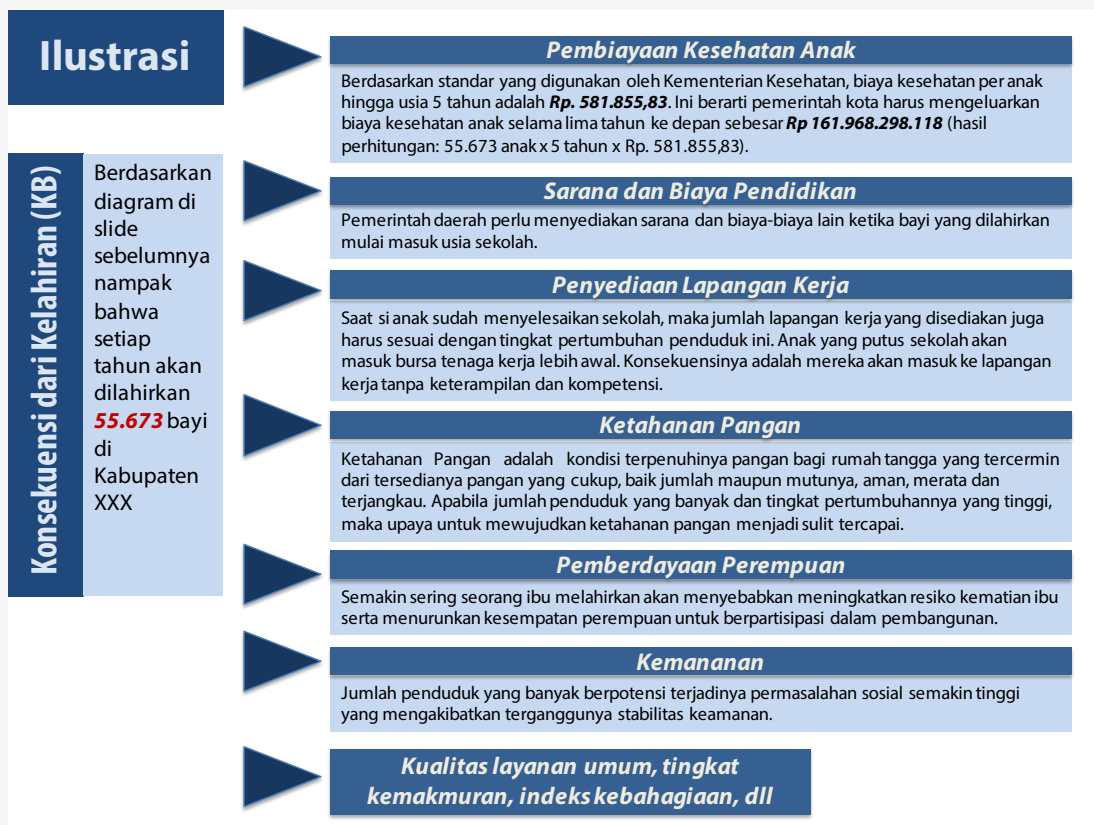


Kondisi Kependudukan Kabupaten XXX

- Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten XXX adalah sebesar 2,56 persen. Berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2010 yakni 3.111.602 jiwa.
- Proyeksi jumlah penduduk di tahun-tahun berikutnya, dengan asumsi tidak ada perubahan yang berarti dalam program Keluarga Berencana dan kependudukan.

2011\$	2012\$	2013\$	2014\$	2015\$
3.191.259	3.272.955	3.356.743	3.442.675	3.530.808

Langkah 2, Mengembangkan analisa dampak lintas sektor berdasarkan proyeksi



Langkah 3, Mengembangkan analisa manfaat lintas sektor jika program kependudukan dan keluarga berencana berhasil karena mendapat dukungan kebijakan dan sumber daya



5. Menuangkan argumentasi dalam lembar kebijakan (*policy brief*)

Argumen isu KKBPK sebagai isu multi-dimensi dan lintas sektoral dituangkan ke dalam bentuk lembar kebijakan yang menjadi bahan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberi dukungan dan mendefinisikan fungsi mereka dalam program KKBPK.

6. Mengembangkan rencana kerja yang SMART dan koordinasi untuk mengawalinya

Perencanaan yang SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound*) membantu membangun keterampilan advokasi dan menyediakan alat bagi anggota kelompok kerja untuk bekerja bersama dalam sebuah rencana kerja yang berorientasi pada tindakan. Rencana kerja ini menyesuaikan dengan kalender anggaran di daerah agar dapat secara maksimal mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

7. Memantau dan Mengevaluasi

Anggota kelompok kerja harus memantau *quick wins* (hasil yang cepat didapat) untuk mengetahui apakah mereka mencapai dampak yang diinginkan. Biasanya serangkaian *quick wins* harus terjadi berurutan atau bersamaan untuk mendapat hasil yang setingkat dengan dampak. Memantau apakah *quick wins* ini sudah terjadi penting untuk penetapan kesuksesan advokasi dan memperdalam efek dari kemenangan cepat itu.

Saat sebuah keputusan diambil yang misalnya menghasilkan perubahan kebijakan, atau kenaikan anggaran, maka segala perubahan jangka pendek yang dihasilkan oleh keputusan tersebut harus dilacak dan dilaporkan kepada para pembuat keputusan.

Sukses berulang dalam advokasi keluarga berencana akan membuat pengambilan keputusan berikutnya, baik keputusan baru atau yang lebih sulit, menjadi lebih mudah. Para pembuat keputusan juga akan lebih mudah mengambil risiko. Untuk menunjukkan hasil dari investasi dalam keluarga berencana, anggota kelompok kerja perlu menyerahkan laporan perkembangan ke pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten.

8. Meresmikan Kelompok Kerja Kedalam Operasional Pemerintah

Seiring keberhasilan dari kelompok kerja, jika situasi memungkinkan para anggotanya bisa merencanakan untuk meresmikan kelompok tersebut agar dapat terus beroperasi di jangka panjang. Ini dapat mencakup pembagian biaya antar kantor pemerintah setempat atau dukungan institutional berupa surat keputusan bupati.

Tolok ukur kunci yang menandakan keberhasilan jangka panjang mencakup:

- Pemerintah kabupaten dan provinsi mendukung kelompok kerja
- Bupati/Walikota dan DPRD mengerti pentingnya keluarga berencana dan menciptakan lingkup kebijakan yang kondusif bagi keluarga berencana
- Anggaran kabupaten untuk Keluarga Berencana meningkat
- Biaya operasional kelompok kerja ditanggung oleh pemerintah setempat
- Kabupaten lainnya mereplikasi model kelompok kerja tersebut
- Pemerintah mengadopsi model kelompok kerja sebagai bagian dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan KJeluarga (KKBPK) Nasional

Keseluruhan langkah di atas dilaksanakan bersama oleh kelompok kerja tingkat kabupaten dengan menggunakan perangkat yang dikenal sebagai BKKBN SMART.

BAB IV

Instrumen Pengembangan Advokasi Berbasis Data: BKKBN SMART

A. KECAKAPAN YANG DIPERLUKAN DALAM PROGRAM ADVOKASI

Seorang pengelola program advokasi memerlukan pemahaman dan penguasaan teknis akan kecakapan-kecakapan berikut:

- Kecakapan dalam melakukan analisis situasi atas problem yang menghambat keberhasilan program KKBPK, diberbagai jenjang: nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- Kecakapan dalam memetakan sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program KKBPK:
 - o Sumber daya pembiayaan di berbagai jenjang nasional, provinsi dan kabupaten/kota
 - o Sumber daya program di sektor lain yang bisa disinergikan dengan program KKBPK (misalnya program penjangkauan masyarakat oleh sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hankam, dll)
 - o Sumber daya yang dikelola oleh sektor lain atau masyarakat madani (organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, universitas, dll)
 - Sumber daya waktu dan tenaga
 - Sumber daya kecakapan (misalnya kecakapan komunikasi yang dimiliki oleh Departemen Ilmu Komunikasi di universitas, kecakapan pengembangan materi komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan swasta yang memiliki unit komunikasi, dll)
 - Sumber daya keuangan (misalnya dana yang tersedia dalam program *Corporate Social Responsibility/CSR* dari sektor swasta)
 - Sumber daya lain yang tersedia sesuai jenjang strategi advokasi yang dirancang (nasional, provinsi, kabupaten/kota)
- Kecakapan dalam memetakan pihak yang paling berpengaruh dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak positif/negative bagi pencapaian tujuan program KKBPK (melalui *Net-Map*)
- Kecakapan melakukan identifikasi permintaan advokasi yang akan diajukan pada pengambil keputusan tersebut (*advocacy ask*)
- Kecakapan membingkai pesan yang disampaikan dalam melakukan pengajuan permintaan advokasi tersebut (dapat menggunakan pendekatan logis, emosional atau etika/hak)
- Kecakapan mengidentifikasi langkah-langkah (aktivitas advokasi) yang diperlukan dalam pencapaian tujuan advokasi (dipenuhinya permintaan advokasi)
- Kecakapan menetapkan indikator keberhasilan yang dituangkan dalam rancangan pemantauan dan evaluasi
- Kecakapan mengembangkan lembar kebijakan (*policy brief*) yang efektif sesuai pembingkai pesan advokasi
- Kecakapan membentuk dan memfasilitasi kelompok kerja advokasi dalam merancang dan melaksanakan strategi advokasi
- Kecakapan memberikan bimbingan teknis berjenjang (BKKBN nasional ke BKKBN provinsi, BKKBN provinsi ke SKPD KB kabupaten/kota) dalam merancang dan melaksanakan strategi

advokasi

- Kecakapan manajerial dalam mengelola suatu program advokasi yang dikembangkan dari proses di atas

B. SKEMA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA PROGRAM ADVOKASI DAN KIE

Pengembangan kapasitas pengelola program Advokasi dan KIE akan dilakukan secara berjenjang, agar terjadi suatu alur yang memungkinkan terjadinya proses yang komprehensif dan memastikan munculnya harmoni dalam pelaksanaan strategi dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Hal ini menjadi penting agar segala upaya komunikasi dan advokasi yang dilakukan dapat secara efektif dan efisien dapat menunjang pencapaian tujuan RPJMN secara umum dan secara khusus dapat memberikan hasil positif dalam SDKI periode mendatang. Proses pengembangan kapasitas, mulai dari perancangan, pelaksanaan dan evaluasi akan berkoordinasi dengan badan atau direktorat terkait seperti PULAP dan Ditbinlap.

Di tingkat nasional, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan kurikulum dan panduan sebagai bahan pengembangan kapasitas. Kurikulum ini merupakan penerjemahan teknis dari dokumen strategi komunikasi dan advokasi ini.
- Pembentukan kelompok fasilitator dengan kepakaran spesifik yang akan menjadi narasumber dalam proses pengembangan kapasitas. Anggota kelompok fasilitator akan didasarkan pada kepakaran yang dimiliki, dan diharapkan keanggotaannya tidak akan terpengaruh oleh mutasi (jika ia adalah pegawai di lingkungan BKKBN). BKKBN dapat merangkul fasilitator dari pihak luar seperti universitas, koalisi kependudukan, pakar, swasta serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
- Pelaksanaan pelatihan bagi kelompok fasilitator (*training of trainers, TOT*) untuk semua panduan yang disepakati. Seluruh staf Direktorat Advokasi dan KIE diharapkan dapat menjadi peserta.
- Pengembangan strategi advokasi dan KIE nasional tahunan yang merupakan penerjemahan dokumen strategi komunikasi dan advokasi ini.
- Pelaksanaan pelatihan dan lokakarya bagi pengelola program advokasi dan KIE di tingkat provinsi yang diselenggarakan secara nasional untuk memastikan keseragaman dan harmoni dalam mengadopsi kecakapan yang diberikan. Untuk merespon kemungkinan terjadinya mutasi di tingkat provinsi yang dapat menghambat serta untuk memperlancar pelaksanaan strategi, peserta provinsi sebaiknya setidaknya terdiri dari tiga orang. Jika mempertimbangkan jumlah peserta efektif maka pelatihan dan lokakarya ini dapat dilakukan dengan membaginya secara regional. Keluaran dari kegiatan ini selain terbangunnya kecakapan komunikasi dan advokasi, adalah rencana kerja komunikasi dan advokasi di tingkat provinsi (termasuk rencana pengembangan kapasitas bagi kabupaten/kota oleh provinsi).
- Pasca pelaksanaan pelatihan dan lokakarya, Direktorat Advokasi dan KIE dapat menjadwalkan rencana pemberian bimbingan teknis pada provinsi untuk memastikan provinsi dapat melaksanakan strategi dan rencana kerja mereka. Pemberian bimbingan teknis ini juga merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Di tingkat provinsi, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Finalisasi (1) strategi komunikasi dan (2) strategi advokasi di tingkat provinsi yang dihasilkan dalam pelatihan dan lokakarya nasional, dengan melibatkan staf bidang lain yang relevan. Untuk strategi advokasi, BKKBN provinsi akan melibatkan pemangku kepentingan dari sektor lain, tokoh serta organisasi yang relevan sesuai panduan pengembangan strategi advokasi.
- Menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya bagi pengelola program advokasi dan KIE di tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan nasional. Peserta kabupaten sebaiknya setidaknya terdiri dari dua orang. Keluaran dari kegiatan ini selain terbangunnya kecakapan komunikasi dan advokasi, adalah rencana kerja komunikasi dan advokasi di tingkat kabupaten.
- Pasca pelaksanaan pelatihan dan lokakarya, BKKBN provinsi dapat menjadwalkan rencana pemberian bimbingan teknis pada kabupaten/kota untuk memastikan mereka dapat melaksanakan strategi dan rencana kerja mereka. Pemberian bimbingan teknis ini juga merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Pada ujung siklus ini, SKPD KB ditingkat provinsi bisa merancang strategi komunikasi dan advokasi yang sesuai kebutuhan daerah mereka dan selaras dengan kebijakan nasional. . Untuk strategi advokasi, SKPD KB akan melibatkan pemangku kepentingan dari sektor lain, tokoh serta organisasi yang relevan sesuai panduan pengembangan strategi advokasi.

C. INSTRUMEN PENGEMBANGAN ADVOKASI BERBASIS DATA

Sebelum dapat berfungsi secara maksimal dalam melakukan advokasi KKBPK, para anggota kelompok kerja perlu dibangun dulu kapasitasnya dalam hal:

1. Melakukan proyeksi populasi serta membuat analisis biaya-manfaat (cost-benefit) atas investasi KB serta mengembangkan argumen mengenai dampak lintas sektoral program KB.
2. Memetakan para pengambil keputusan dan pihak yang berpengaruh dalam keputusan yang terkait pembiayaan dan dukungan atas program KB.
3. Mengidentifikasi khalayak advokasi, membingkai isu KB yang sesuai dengan perhatian dan fokus para pengambil keputusan.
4. Mengembangkan rencana kerja advokasi dan lembar advokasi kebijakan.

Pendekatan advokasi yang digunakan adalah evidence based advocacy (advokasi berbasis data/bukti). Pengembangan rencana implementasi advokasi serta pemantauan dan evaluasinya ini akan menggunakan beberapa instrumen, yakni:

- BKKBN SMART (Adopsi dari AFP SMART), instrumen untuk merancang rencana kerja advokasi dan memantau hasilnya.
- Net-map, instrumen untuk memetakan para pengambil keputusan dan mengidentifikasi pihak yang paling berpengaruh.
- *Family Planning Projection Tool*, instrumen yang diadopsi dari Reproductive Health Costing Tool – UNFPA, instrumen ini digunakan untuk melakukan proyeksi kependudukan serta menghitung biaya dan manfaat investasi pada KB. Instrumen ini dapat digantikan dengan instrumen lain yang bisa menggambarkan kondisi jika program KKBPK gagal atau berhasil, contoh misalnya

instrumen perhitungan kelahiran yang terhindarkan.

Jika digambarkan, antara siapa pelaku serta instrumen apa yang digunakan, maka ia akan nampak seperti gambar berikut:

Perangkat Pengembangan Advokasi

PERENCANAAN STRATEGIS

AFP SMART

Lembar kerja yang diisi bersama-sama pemangku kepentingan melalui diskusi, untuk mengembangkan strategi advokasi yang fokus (khalayak sasaran, membingkai pesan advokasi ("ask") agar sesuai dengan prioritas pengambil keputusan, rencana aksi, materi dan monev.

Proses: diskusi dengan pemangku kepentingan

Keluaran: Strategi dan rencana kerja advokasi berbasis bukti, policy brief

Pemetaan Pemangku Kepentingan/Netmap

Pemetaan aktor dan pemangku kepentingan KB, relasi diantara mereka serta tingkat kekuatan pengaruh.

Proses: diskusi dengan pemangku kepentingan

Keluaran: peta komprehensif pemangku kepentingan

Proyeksi Kependudukan

Pengembangan skenario proyeksi kependudukan sebagai bahan membangun argumen.

Proses: Mengolah data kependudukan, menentukan skenario

Keluaran: Skenario proyeksi kependudukan, analisis biaya dan manfaat

ADVOKAT

Nasional

Berbentuk forum yang mengundang para pakar dan pemerhati di bidang KKBPK dan kesehatan, kementerian dan lembaga yang terkait dengan isu advokasi tertentu, perwakilan sektor-sektor dari subnasional

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Sosial Budaya, Pengelola program PKH, dll

Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Koalisi Kependudukan, Organisasi profesi dokter atau perawat, dll

Lembaga swadaya masyarakat seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Organisasi religius seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Anggota DPRD, Tokoh masyarakat, Sektor swasta, dll

Rencana Kerja Advokasi dan Lembar Kebijakan

Pemetaan Jejaring Advokasi

Tujuan pemetaan jejaring adalah:

- Memetakan jaring kerja dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui diskusi diantara para pemangku kepentingan
- Digunakan untuk memahami dinamika jaringan:
 - Siapa pelaku di lapangan
 - Bagaimana mereka saling terhubung
 - Pengaruh apa yang mereka miliki
 - Bagaimana sikap dan tujuan mereka terhadap isu yang sedang kita kerjakan
- Menentukan khalayak sasaran advokasi

Langkah yang perlu dilakukan:

1. Persiapan
2. Menentukan aktor/pelaku di lapangan
3. Menentukan hubungan antar aktor/pelaku
4. Menentukan besar pengaruh dari aktor/pelaku tersebut
5. Menentukan tujuan aktor/pelaku (apa yang menjadi perhatian mereka dan apa yang mereka ingin capai)
6. Diskusi

1. Persiapan

Siapkan peralatan berikut:

- Kertas ukuran A0
- Spidol beberapa warna
- Kertas kecil beberapa warna yang berstiker sehingga dapat ditempel pada kertas ukuran A0 di atas

Persiapan sebelum mulai diskusi:

- Tentukan siapa yang menjadi moderator
- Tuliskan di kertas A0
 - o Kiri atas tanggal saat diskusi
 - o Kanan atas nama moderator dan asal organisasi
 - o Tuliskan di bagian tengah atas, pertanyaan yang ingin dijawab melalui analisa jejaring, misalnya "Siapa pihak yang terlibat dan paling berpengaruh dalam memutuskan meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan program KKBPK?"
 - o Tentukan makna dari garis yang nanti akan digunakan menghubungkan aktor/pelaku (misalnya biru untuk hubungan koordinasi, hijau untuk hubungan melaporkan, merah untuk hubungan memberi perintah, dll). Tuliskan di bagian kiri di bawah tanggal
 - o Tuliskan nama-nama yang menjadi nara sumber diskusi ini, yaitu peserta diskusi, di bagian kanan, di bawah nama fasilitator
 - o Tentukan warna kertas bagi masing-masing kategori aktor/pelaku (misalnya merah untuk eksekutif, biru untuk legislatif, kuning untuk mitra, dll). Tuliskan di kertas warna dan tempelkan di bagian kanan di bawah narasumber.

Diskusi

Setelah persiapan dilakukan, maka langkah yang dilakukan adalah seperti di bawah ini.

2. Menentukan aktor/pelaku di lapangan

Dengan dipandu oleh moderator, mulailah diskusikan siapa saja yang terlibat dalam hal yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Tuliskan mereka (bisa lembaga atau perseorangan), sesuai kertas warna yang ditentukan. Tempelkan di kertas A0.

3. Menentukan hubungan antar aktor/pelaku

Setelah semua aktor/pelaku diidentifikasi dan diletakkan ke dalam kertas kerja. Diskusikan hubungan apa saja yang ada di antara mereka.

Jangan lupa, yang ingin kita petakan adalah jejaring yang sesungguhnya dan bukan jejaring sesuai harapan kita. Justru dengan mengenali jejaring yang sesungguhnya, kita bisa memperbaikinya di masa depan.

Jika hasil diskusi menunjukkan bahwa ada beberapa pelaku yang seharusnya memiliki hubungan namun dalam kenyataan belum terbangun hubungannya, maka jangan dibuatkan garis. Ingat prinsip di atas.

4. Menentukan besar pengaruh dari aktor/pelaku tersebut

Setelah hubungannya digambarkan dengan garis warna yang sudah disepakati dalam persiapan, maka langkah berikutnya adalah menentukan seberapa besar pengaruh mereka. Gunakan rentang nilai dari 0 – 5. 0 bermakna tidak berpengaruh sama sekali dan 5 bermakna sangat besar pengaruhnya.

5. Menentukan tujuan aktor/pelaku

Setelah kekuatan pengaruh mereka dinilai, maka langkah berikutnya adalah melihat, apakah tujuan para aktor/pelaku ini sesuai dengan tujuan kita? Atau berbeda? Berseberangan? Jika sesuai maka bubuhkan tanda plus (+) di sebelah angka besar pengaruh, jika berseberangan maka bubuhkan tanda minus (-) di sebelah angka besar pengaruh. Jika netral, jangan membubuhkan apapun.

6. Diskusi

Diskusikan dengan detail hasil pemetaan jejaring ini. Kaji ulang apakah sudah akurat, jangan segan untuk mengubah apa yang sudah dituangkan jika belakangan ada informasi baru yang berbeda. Jika sudah selesai, maka kita bisa menentukan:

- Pihak pengambil keputusan yang memiliki nilai tertinggi (artinya yang paling berpengaruh) akan menjadi khalayak sasaran advokasi untuk isu yang sesuai dengan pertanyaan pemetaan. Terlebih jika tujuannya kita identifikasi sebagai minus (-)
- Pihak yang bukan pengambil keputusan dan memiliki nilai tujuan plus, akan kita jadikan sebagai mitra dalam melaksanakan advokasi.

Gambar berikut adalah contoh hasil diskusi. Hasil pemetaan jejaring ini akan kita rujuk kembali saat kita mengisi lembar BKKBN SMART.

Tanggal

Pertanyaan NetMap

Siapa yang paling berpengaruh dalam ..

(Tujuan Advokasi – AFP SMART - Langkah 1)

Fasilitator:

- Fasilitator 1
- Fasilitator 2

Hubungan:

- Koordinasi
- Mempengaruhi

Narasumber:

- Narsum 1
- Narsum 2

Aliansi

Aktor 2
Aktor 3
Aktor 4
Aktor 5
Aktor 6
Aktor 7

Sasaran
Advokasi

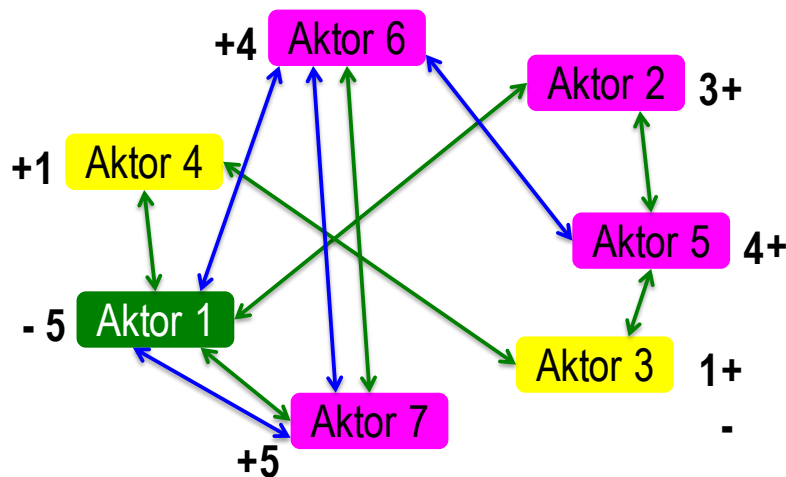
Aktor 1

Unsur

Eksekutif

Legislatif

Mitra Kerja



Panduan Advokasi BKKBN SMART

Panduan ini merupakan adaptasi dari panduan AFP yaitu *AFP SMART: A Guide to Quick Wins*.

Panduan ini berbentuk lembar kerja yang diisi bersama-sama oleh Kelompok Kerja Advokasi melalui diskusi yang berdasarkan pada data nyata di lapangan. Panduan ini digunakan dalam langkah 2 dan 3 (*Melakukan analisis situasi dan pemetaan jejaring dan Mengembangkan rencana kerja advokasi Pengelola program KKBPK*).

	Lembar Kerja Pengembangan Strategi Advokasi Pengelola Program KKBPK BKKBN SMART
Menetapkan Isu Strategis	
Isu Strategis A. B. C. Penjelasan dan Contoh <i>Pada bagian ini, Kelompok Kerja Advokasi menuliskan hasil diskusi yang disepakati mengenai permasalahan yang dihadapi, misalnya: terkait dengan masih rendahnya capaian program KKBPK terutama MKJP, isu strategisnya misalnya adalah:</i> A. <i>pemahaman akan program KB dan manfaatnya yang kurang di masyarakat akibat masih sedikitnya kampanye penjelasan mengenai secara lengkap dan akurat,</i> B. <i>Petugas kesehatan yang terampil menjelaskan dan melakukan penjangkauan masih sedikit,</i> C. <i>Masih sedikitnya Bidan yang terlatih</i> D. <i>Minimnya alokasi anggaran daerah untuk pembiayaan program KKBPK</i>	
Menetapkan Tujuan dan Sasaran SMART	
Tujuan 1. 2. Sasaran 1. 2. 3. 4. Penjelasan dan Contoh <i>Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dan terkait dengan isu strategis yang disepakati di atas. Terkait dengan penjelasan dalam naskah panduan advokasi di mana sebisa mungkin periode rencana kerja advokasi disesuaikan dengan kalender pembangunan daerah, maka dalam menetapkan tujuan inipun perlu mempertimbangkan tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu itu. Jika ada tujuan yang memerlukan waktu yang lama, maka Kelompok Kerja Advokasi perlu memecahnya, hal yang dimasukkan dalam tujuan rencana kerja tahun ini adalah yang menjadi dasar pencapaian tujuan lain.</i> <i>Contoh misalnya upaya meningkatkan kesertaan KB sebanyak 5% hanya akan terjadi jika petugas kesehatan terampil, sarana tersedia, dan materi komunikasi yang baik dan tersebar ke khalayak sasaran. Hal ini hanya</i>	

Contoh misalnya upaya meningkatkan kesertaan KB sebanyak 5% hanya akan terjadi jika petugas kesehatan terampil, sarana tersedia, dan materi komunikasi yang baik dan tersebar ke khalayak sasaran. Hal ini hanya akan terjadi jika alokasi anggaran program KBPK dinaikkan. Sementara itu kita tahu, bahwa advokasi kenaikan anggaran bisa berlangsung selama satu tahun dikarenakan adanya kalender penganggaran daerah tahunan. Dalam kasus itu, maka rencana kerja tahun ini adalah:

Menaikkan anggaran APBD dan alokasi anggaran APBDes sebanyak xxx % pada bulan xxx* tahun xxx** untuk digunakan pembiayaan pengadaan materi komunikasi, melatih tenaga kesehatan dan pengadaan sarana/prasarana KBPK.
Mengembangkan materi kurikulum dan materi penjelasan program KB Pasca Salin pada bulan yyy*** tahun xxx** bekerja sama dengan IBI, Dinkes dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas zzz

*bulan biasanya anggaran daerah ditentukan

**tahun berjalan

***tentukan waktunya

Jadi dalam contoh di atas, ada dua hal yang dilakukan, sambil melakukan advokasi kenaikan anggaran, Kelompok Kerja Advokasi menyiapkan kurikulum dan materi yang bisa segera digunakan dalam pelatihan petugas kesehatan dan diproduksi saat anggaran tersedia.

Sasaran adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Satu tujuan memiliki beberapa sasaran. Contoh misalnya dalam tujuan pertama yaitu menaikkan anggaran APBD dan alokasi APBDes untuk program KB, maka ilustrasi langkah yang diperlukan adalah:

1. Menyiapkan lembar advokasi (policy brief) mengenai masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, apa permintaan advokasi serta apa manfaat solusi tersebut secara lintas sektor
2. Melakukan pertemuan dengan khalayak sasaran advokasi yang diidentifikasi dan mendapatkan persetujuan untuk menindaklanjuti permintaan advokasi (advocacy ask) yang diajukan dalam lembar advokasi
3. Bersama dengan SKPD Kesehatan dan SKPD terkait (pemberdayaan perempuan, Bapermas, Bappeda) dan lembaga terkait (GOW, lembaga pemberdayaan perempuan lain, dll) menemui Bupati/Walikota untuk menyampaikan isi lembar advokasi
4. Melakukan atau berpartisipasi dalam dengar pendapat dengan DPRD
5. Menuliskan dan menayangkan pertemuan di media internal anggota Kelompok Kerja Advokasi dan media massa (melalui advokasi media), sehingga isu tersebut menarik banyak perhatian
6. Menuliskan di media yang sama, ketika anggaran akhirnya disetujui, sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip penghargaan pada pembuatan keputusan

Mengidentifikasi Pengambil Keputusan

Pengambil Keputusan

1.
2.

Penjelasan dan Contoh

Masukkan di bagian ini siapa yang menjadi pengambil keputusan sesuai dengan tujuan advokasi kita. Contoh misalnya jika itu berkaitan dengan anggaran APBD, maka para pengambil keputusan seperti Bupati/Walikota adalah pengambil keputusan. Jika itu terkait dengan pengembangan kurikulum maka mitra yang akan diajak kerjasama yang mengambil keputusan. Seringkali dalam banyak sekali kasus, mitra ini sebenarnya berpotensi untuk dijadikan bagian dari anggota Kelompok Kerja Advokasi.

Analisis Situasi Eksternal

Tantangan Eksternal

1.
2.

Peluang Eksternal

1.
2.

3.	3.
4.	4.

Penjelasan dan Contoh
Setelah mengidentifikasi tujuan, sasaran dan siapa pengambil keputusan yang terkait. Hal selanjutnya adalah melakukan analisis mengenai tantangan dan peluang yang ada di lapangan.

Hasil analisis tantangan eksternal akan membuat kita mempersiapkan diri dengan respon yang sesuai. Hasil analisis peluang eksternal akan membuat upaya kita lebih ringan, karena kita bisa memanfaatkan peluang itu dan mengintegrasikannya ke dalam strategi advokasi kita. Sebagai contoh peluang misalnya, terkait dengan tujuan di atas (A) Gabungan Organisasi Wanita (GWO) di kabupaten memiliki rasa keprihatinan yang sama, sehingga bisa diajak ke dalam upaya Advokasi dan membawa sumber daya yang mereka miliki, (B) Adanya Jurusan Ilmu Komunikasi di universitas setempat yang bisa dimanfaatkan kecakapan merancang materi komunikasi yang baik, melalui skema Kuliah Kerja Nyata atau Lembaga Pengabdian Masyarakat, dll.

Dalam konteks ini, seorang advokat yang baik akan bersikap oportunistik. Oportunis tidak selamanya bermakna buruk. Ajaklah pihak yang teridentifikasi dalam peluang eksternal ini sebagai bagian dari kelompok kerja

Menetapkan Strategi Advokasi pada Pengambil Keputusan

Nama Pengambil Keputusan
.....

Nilai Utama Pengambil Keputusan	Pengetahuan
	Nilai
	Keinginan untuk Bertindak

Penjelasan dan Contoh
Setelah pengambil keputusan diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah menjadikannya khalayak sasaran advokasi. Untuk itu para advokat dalam Kelompok Kerja Advokasi perlu mengenali karakteristik dari khalayak sasaran ini. Pengenalan kita akan khalayak sasaran akan mempermudah kita dalam membingkai isu atau permintaan advokasi yang kita ajukan, ke dalam bingkai yang sesuai dan mudah diterima khalayak sasaran. Khalayak sasaran tidak akan mengabaikan permintaan kita jika ia tidak menganggapnya penting. Salah satu cara untuk membuatnya nampak penting adalah dengan melakukan pembedaan. Sebagai contoh, isu KKBPK bisa dibingkai tidak hanya sebagai isu kesehatan saja, tetapi juga isu pemberdayaan manusia, pendidikan, keamanan, kualitas generasi berikutnya, dll.

Langkah pertama pembedaan adalah dengan mengidentifikasi apa yang menjadi nilai utama yang dianut oleh khalayak sasaran, apa titik perhatiannya, seberapa tahu ia akan isu yang kita usung dan berada di titik mana ia berada (tidak ingin bertindak, mau bertindak tapi belum yakin, sudah bertindak tapi belum efektif, sudah bertindak dengan efektif, dll).

Tuliskan nama pengambil keputusan dengan benar. Diskusikan dengan anggota Kelompok Kerja Advokasi yang lain:

- Seberapa tahu, beliau akan isu yang kita usung? Apa yang ia tahu? Apa yang ia tidak tahu? Tuliskan dalam kolom Pengetahuan.

- Apa yang menjadi nilai yang dianggap penting oleh beliau? (ekonomi dan investasi?, kualitas sumber daya manusia? Nilai religi? Efisiensi? Tuliskan dalam kolom Nilai.
- Berdasarkan apa yang kita ketahui dan kejadian yang sudah ada, analisa berada di titik mana beliau dalam konteks keinginan bertindak? Isikan dalam kolom Keinginan untuk Bertindak
- Ketiga hal ini kemudian digunakan untuk menentukan apa nilai utama pengambil keputusan

Di tahap ini sudah semakin jelas bagi kita, profil khalayak sasaran kita ini dan kita siap untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu membingkai isu sesuai dengan hasil analisis di atas.

Kita sudah mulai punya gambaran bagaimana mengaitkan/membingkai isu yang kita usung (misalnya KKBPK) ke dalam nilai dan perhatian beliau (apakah akan membingkai isu bahwa keluarga dengan anak banyak akan kurang maksimal dalam pengelolaan keluarga dan pendidikan anak, sehingga jika prevalensinya besar maka kualitas generasi berikutnya akan terancam? Atau akan dikemas bahwa jika tindakan pencegahan kelahiran tidak dilakukan maka jumlah penduduk berbagai usia akan terus bertambah pesat dan mejadi beban daerah bagi pembiayaan penanganannya?, dll)

Mengidentifikasi Pembingkai Isu yang Tepat Bagi Pengambil Keputusan

Rasional

Penjelasan dan Contoh

Kita sudah mulai punya gambaran bagaimana mengaitkan/membingkai isu yang kita usung (perlunya peningkatan alokasi anggaran bagi program KKBPK) ke dalam nilai dan perhatian beliau.

Kita memiliki tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk membantu pembingkai ini. Pembingkai yang sifatnya rasional, emosional dan etika.

Emosional

Contoh bingkai rasional misalnya adalah:
"Jika tindakan pencegahan kelahiran/meningkatkan CPR tidak dilakukan maka jumlah anak yang dilahirkan akan terus bertambah pesat dan mejadi beban daerah bagi berbagai pembiayaan (pendidikan, kesehatan, dll)."

Contoh bingkai emosional misalnya adalah:
"Keluarga, terutama yang tidak mampu, akan makin buruk kualitas kehidupannya, tak mampu membiayai pendidikan anaknya, sehingga kualitas generasi berikutnya akan terancam". Kemudian dalam policy brief atau presentasi kita menggunakan gambar yang menggugah rasa kemanusiaan.

Etika

Contoh bingkai etika misalnya,:
"Seperti dimandatkan dalam SDGs, amanat presiden dan hak-hak kesehatan reproduksi serta hak-hak perempuan, maka sudah seharusnya pemerintah daerah xxx melaksanakan program kesehatan reproduksi dan KB agar perempuan dapat lebih berkiprah dalam pembangunan."

Isikan di masing-masing kolom. Diskusikan mana yang paling sesuai untuk dijadikan strategi dalam berkomunikasi dengan khalayak sasaran? Jangan khawatir kita bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan sekaligus. Jika ragu, gunakan pendekatan yang rasional saja.

Mengembangkan Pesan

Perhatian Utama		Keberatan dan Tanggapan
	Nama Khalayak Sasaran	
Manfaat		Permintaan yang SMART

Penjelasan dan Contoh

Setelah kita memutuskan bagaimana kita akan mengemas isu advokasi kita, selanjutnya kita akan menuangkannya dalam kalimat pesan. Kalimat pesan ini yang akan mewarnai seluruh komunikasi Kelompok Kerja Advokasi dengan khalayak sasaran advokasi, baik dalam policy brief, presentasi, pertemuan, tulisan di media, wawancara di media, dll.

1. Pertama-tama isikan nama khalayak sasaran
2. Kemudian isikan apa perhatian utamanya
3. Diskusikan dan identifikasi, kira-kira apa keberatan dan tanggapan yang akan menjadi reaksi khalayak sasaran (misalnya: "masih banyak isu kesehatan lain yang lebih penting, KB tidak penting," atau "program KB itu mahal, padahal daerah ini perlu untuk peningkatan kualitas pendidikan," dll.
4. Dari apa yang kita duga akan menjadi reaksi, kemas manfaat dari dipenuhinya permintaan advokasi yang ada. Dengan kata lain, kotak Manfaat adalah respon langsung dari kotak Keberatan dan Tanggapan. Misalnya, "pembiayaan KB tidak mahal dan justru malah akan menghilangkan biaya pembangunan yang tidak perlu dan menghemat anggaran bagi sektor lain."
5. Berdasarkan hal di atas, serta pembimbingan yang kita pilih, rumuskan dalam bentuk kalimat apa yang menjadi pesan:
 - a. Apa yang perlu dilakukan? (jika ada angka, seberapa banyak, seberapa besar)
 - b. Kapan itu diperlukan?
 - c. Apa manfaatnya bagi khalayak sasaran?

Penyampai Pesan

Nama Penyampai Pesan (Juru Bicara)

.....

Penjelasan dan Contoh

Setelah mengidentifikasi pesan untuk disampaikan, tidak harus anggota Kelompok Kerja Advokasi sendiri yang menjadi penyampai pesan atau juru bicaranya. Carilah juru bicara yang memiliki potensi terbesar untuk didengarkan oleh dan mempengaruhi khalayak sasaran. Bisa saja memang, kebetulan orang yang memiliki potensi besar mempengaruhi ini sudah menjadi anggota Kelompok Kerja Advokasi. Jika ia belum menjadi anggota, maka perlu ditentukan suatu pertemuan dengan beliau dan memberi penjelasan yang rinci mengenai inisiatif advokasi yang tengah dilakukan.

Mengembangkan Rencana Kerja

Tantangan Internal 1. 2. 3. 4.	Peluang Internal 1. 2. 3. 4.
--	--

Petunjuk dan Contoh

Langkah terakhir adalah mengembangkan rencana kerja. Namun agar rencana kerja yang dikembangkan bersifat realistis dan mungkin dilaksanakan (ingat makna dari konsep SMART), maka sebelumnya kita berkaca diri dulu apakah masih ada tantangan internal yang perlu diatasi. Identifikasi juga peluang internal (peluang

yang ada dalam masing-masing organisasi anggota Kelompok Kerja Advokasi), yang bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja. Format rencana kerja dapat dituangkan ke dalam tabel berikut, untuk selanjutnya jika sudah diisi dapat diberi narasi dan memasukkan bagian lain dalam lembar kerja ini (seperti siapa khalayak sasaran, pesan apa yang disampaikan, dll).

Tabel Rencana Kerja Advokasi

Rencana Kerja Detail dan Anggaran				
Sasaran SMART	Langkah/ Aktivitas Input	Perkiraan Biaya	Penanggungjawab	Jadwal
Indikator Kemajuan				
Keluaran (Output) yang Diharapkan: - -		Hasil (Outcome/Quick Win) yang Diharapkan: - -		

DAFTAR RUJUKAN

Advance Family Planning, AFP SMART: A Guide to Quick Wins

Advance Family Planning, Panduan Pengembangan Kelompok Kerja Advokasi

BKKBN, Strategi Komunikasi dan Advokasi, 2017

BKKBN, Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2015-2019

JHCCP, Optimalisasi Peran CWG Dalam Advokasi Untuk Implementasi Program KB, Advance Family Planning 2015

JHCCP, Studi Formatif Program ICMM, 2015

McKee, N., Social Mobilization & Social Marketing in Developing Communities: Lessons for Communicators. Panang, Malaysia: Southbound, 1992



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2017

